

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah & Hukum UIN
Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

AHMAD TAUFIK
NIM: 10500113178

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Taufik
NIM : 10500113178
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 10 Desember 1994
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Fakultas/Program : Syariah & Hukum
Alamat : Jl. Kintamani No.1 Perum. Bukit
Baruga, Kel. Antang, Kec. Manggala,
Kota Makassar
Judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Barang Bukti
Tindak Penyalahgunaan Narkotika di
Kejaksaan Negeri Makassar”

Makassar, 18 Agustus 2020

Penyusun,



Ahmad Taufik

NIM: 10500113178

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar**”, yang disusun oleh Ahmad Taufik, NIM: 10500113178, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam siding munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 M, bertepatan dengan 28 Dzulhijjah 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).*

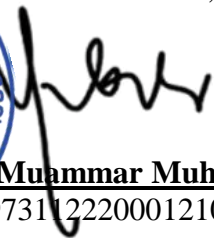
Gowa, 18 Agustus 2020 M
28 Dzulhijjah 1441 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. H. Muammar M. Bakry, Lc., M.Ag (.....)	
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd (.....)	
Munaqisy I	: Istiqamah, S.H., M.H (.....)	
Munaqisy II	: Ashar Sinilele, S.H., M.H (.....)	
Pembimbing I	: Dr. Hamsir, S.H., M.H (.....)	
Pembimbing II	: Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H (.....)	

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,




Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
NIP. 197311222000121002KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Lembut, yang membuat hidup indah pada waktunya, meskipun ucapan syukur ini tidak cukup mewakili penulis dalam membalas kenikmatan-Nya, tetapi hidup akan lebih terasa nikmat jika penulis masih diberikan kesempatan untuk tetap bersyukur. Salam dan shalawat juga penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang Rahmatan Lil'alam

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua, Ayahanda tercinta, H.A Ismail Rachman dan Dra. H. Megawati atas segala cinta kasih yang diberikan yang tak mungkin terbalaskan baik moril maupun

materil, almarhumah nenekku Hj. Puang Rabiah, yang mengisi masa kecilku dengan kenangan yang terindah dalam tatapannya selalu berdoa untukku, saudara/i tercinta Rana Prahasta, ST., Rahma Dewi, SH., Ismawati, ST., yang telah mendukung penulis selama penyusunan, memberi motivasi untuk mencoba hal – hal baru yang positif dan hingga saat ini mereka adalah kekuatan bagiku. Dan kepada Sri Hijriani, S.Pd, Gr yang selalu setia menemani penulis baik suka dan duka, mendengarkan keluh kesah penulis dan membantu serta mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

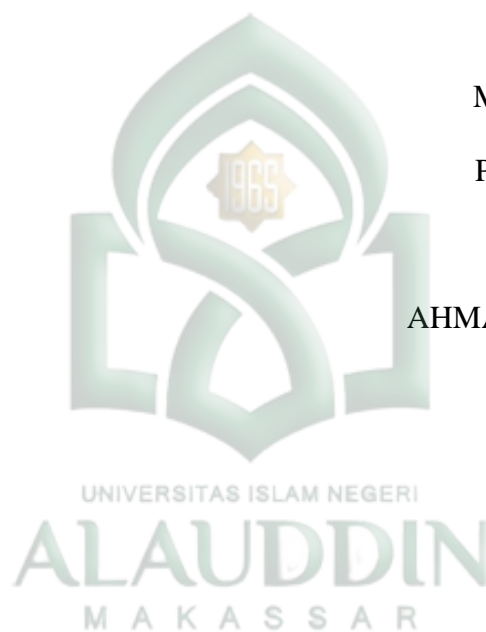
1. Rektor Universitas Islam Negeri, Bapak Prof. H. Hamdan Juhanis, MA, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Bapak Dr. Hamsir, SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H selalu Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Kepada para penguji, Ibu Istiqamah, S.H., M.H selaku penguji I dan Bapak Ashar Sinilele, S.H., M.H selaku penguji II yang sudah memberikan saran dan kritik saat seminar proposal hingga ujian skripsi
7. Bapak / Ibu dosen dan seluruh staf pegawai Akademik Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Ibu N. Farahyanti, S.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan Bapak Tabrani, S.H selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Makassar yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi data dalam proses penelitian penulis di instansi terkait.
9. Kawan – kawanku yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan dan bersama – sama berjuang dalam menyelesaikan studi, kepada Andi Nurramadhan, Muhammad Irfan, Muh. Zulvikar Kadir, Nur Fajar Ramli, Rian Nur Fitrah, Muhammad Adnan serta sahabat – sahabatku yang selalu ada disaat penulis membutuhkan nasehat, khususnya kepada Akbar Muji, Much. Hidayat, S.Sos., Asri Samad, S.IP., dan Adli Ismirandi S.Pt., M.Si
10. Rekan – rekan angkatan EKSIBANAT XVIII UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin Makassar, Rekan – rekan angkatan Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM), serta rekan – rekan angkatan Study Club Intellectual Law Enforcement (ILE) yang tidak bisa disebutkan satu – satu namanya, yang banyak memberikan motivasi

dan semangat untuk bisa maju hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian penulis sampaikan, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat untuk memperluas cakrawala berpikir kita semua

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Makassar, 18 Juni 2020

Penulis,

AHMAD TAUFIK

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. FOKUS PENELITIAN & DESKRIPSI FOKUS	5
D. KAJIAN PUSTAKA	6
E. TUJUAN & KEGUNAAN PENELITIAN	9
BAB II PEMBAHASAN	11-66
A. TINJAUAN TEORITIS	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Pengertian Tinjauan Yuridis	12
3. Pengertian Narkotika	12
4. Pengertian Alat Bukti	14
5. Barang Bukti	19
6. Penyitaan	19
7. Pemusnahan	30
B. METODOLOGI PENELITIAN	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Sumber Data	37
3. Lokasi Penelitian	38
4. Teknik Pengumpulan Data	38

5. Teknik Analisis Data	38
C. HASIL PENELITIAN	39
1. Profil Kejaksaan Negeri Makassar	39
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Makassar	41
3. Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar	47
4. Kendala – Kendala dan Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Makassar dalam Mengatasi Permasalahan Penyimpanan & Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika	56
BAB III PENUTUP	67-68
A. KESIMPULAN	67
B. IMPLIKASI PENELITIAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69-71
A. BUKU	69
B. UNDANG – UNDANG	70
C. KARYA ILMIAH	70
D. SUMBER ONLINE	71
E. WAWANCARA	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN	72

ABSTRAK

Nama : Ahmad Taufik

NIM : 10500113178

**Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti
Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri
Makassar**

Dalam skripsi ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan tentang bagaimanakah ketentuan hukum mengatur pelaksanaan proses pemusnahan barang bukti narkotika dalam pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Makassar? Dan juga faktor – faktor apa saja yang menghambat proses pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar? Dari hasil penelitian di lapangan kemudian penulis mencoba menelaah setiap kendala yang dihadapi dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika dan mencari tahu upaya apa saja yang dapat ditempuh sehingga permasalahan yang ada dapat diminimalisir kekurangannya ataupun segala bentuk ketidaksesuaian dapat teratasi dengan efektif

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Lapangan yang mana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan data sekunder. Dimana data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara berbentuk tanya jawab langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data. Metode ini berguna sebagai alat ukur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, referensi – referensi, peraturan perundangan dan dokumen – dokumen hukum yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini dengan melakukan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, penulis mendapati fakta – fakta yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan pedoman pemusnahan barang bukti narkotika yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang disebabkan beberapa kondisi internal seperti fasilitas rumah penyimpanan barang bukti yang kurang memadai dan juga waktu yang diberikan dalam pemusnahan barang bukti yang terlalu singkat serta anggaran biaya pelaksanaan pemusnahan barang bukti sangat terbatas sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika untuk memenuhi standar yang telah diterapkan.

Implikasi dari penelitian ini adalah 1). Dari penjelasan tentang tata cara penyimpanan Benda Sitaan Narkotika perlu dilakukan evaluasi dan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Makassar dengan Kejaksaan Tinggi Sulsel berkaitan dengan letak rumah penyimpanan benda sitaan ditempatkan berdekatan dengan Pengadilan Negeri sehingga lebih efektif

pada saat dibutuhkan dalam persidangan bisa segera dihadirkan dan benda sitaan tetap disimpan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan. 2). Mekanisme Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang dilakukan Kejaksaan Negeri Makassar melalui proses pengumpulan Barang Bukti Narkotika dalam jumlah banyak terlebih dahulu baru kemudian dimusnahkan sekaligus dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan perlu dilakukan evaluasi kembali dan melakukan peraturan sesuai ketetapan yakni 7 (hari) segera dimusnahkan mengingat dalam jangka waktu tersebut dianggap cukup lama dan tidak sesuai ketetapan peraturan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan benda sitaan dan penyelewengan kekuasaan terhadap barang bukti tersebut karena tidak segera dimusnahka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara dengan taat sistem hukum, karena itu masyarakat tentu sudah mengenal beberapa peraturan – peraturan yang telah diatur dalam Undang – undang baik itu dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan. Sanksi yang tegas juga tidak luput dari perhatian Pemerintah saat ini, tidak terkecuali kalangan rakyat kecil hingga para stakeholder senantiasa akan mendapatkan hukuman apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Saat ini ada beberapa kasus yang tengah marak melanda Bumi Pertiwi ini, salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau yang lebih populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat Berbahaya)

Narkotika menurut Undang – undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹

¹ Himpunan Peraturan Perundangan, *Anti Narkoba* (Cet ; Yogyakarta: Puustaka Yustisia., 2006), h. 3.

Dari data yang penulis himpun, saat ini Indonesia masuk dalam daftar 7 Negara dengan tingkat penyalahgunaan Narkoba terbanyak, atau lebih tepatnya berada di posisi nomor 6 setelah Mexico dan Brazil. Bayangkan saja, sepanjang tahun 2016 data yang dihimpun setidaknya ada 6,4 Juta jiwa yang telah terjerumus dengan benda haram tersebut. Tentu ini menjadi musuh besar Bangsa kita saat ini mengingat pengguna Narkoba sebagiannya adalah masyarakat yang berstatus pelajar, di mana ini akan merusak masa depan moral Bangsa.

Disadari bahwa untuk mengatasinya tidaklah mudah. Kasus tersebut terus saja berkembang dengan analisis bahwa unsur penggerak dan motivator utama dari pelaku tidak lain adalah keuntungan ekonomis. Bisnis ini merupakan bisnis yang menggiurkan dan tidak heran apabila kasus ini meningkat di setiap tahunnya dibanding kasus – kasus lain. Dapat dipastikan bahwa pengedaran barang haram tersebut telah merambah ke setiap wilayah pelosok Indonesia entah Kabupaten atau Kota, begitu juga dengan penggunaannya tidak menutup kemungkinan dari masyarakat status pelajar hingga para stakeholder sekalipun.

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang

sangat membahayakan kehidupan masyarakat, moral bangsa dan Negara²

Oleh karena hal ini merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks, memerlukan penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten, baik dalam segi penyebaran maupun pengguna barang haram tersebut³

Bahkan dalam beberapa kasus, penulis menemukan dugaan penggelapan penyitaan barang bukti Narkotika ditingkat penyidikan sebelum barang bukti Narkotika tersebut dimusnahkan, pelaku tidak lain adalah aparat penegak hukum itu sendiri yang merupakan garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana narkotika justru menyalahgunakan wewenangnya. Sungguh ironis bukan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman?⁴

Penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dimaksud penulis adalah tindakan dari penyidik atau pejabat lainnya yang berwenang dalam

² Samsul Arisandi "Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta", *skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

³ Rahma Dewi "Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Makassar", *skripsi*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011

⁴ Pasal 1 Ayat (23) PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menindaki barang bukti narkoba tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga terjadinya celah untuk oknum – oknum penyidik maupun pejabat lainnya dapat membuat tindakan yang bertentangan / melawan dengan hukum (*onrechtmatiggedaad*).

Setiap barang bukti narkoba yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang harus segera dimusnahkan. Hal ini sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Kota Makassar guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara dan sebagainya⁵

Berdasarkan kasus tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa telah terjadi kasus serupa yang dilakukan oleh oknum – oknum penyidik maupun pejabat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu harus ada transparansi dalam menyampaikan proses pemusnahan barang bukti supaya dapat ditekan penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh oknum – oknum penyidik maupun pejabat. Ada dugaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Makassar belum terlaksana dengan baik sehingga memungkinkan oknum – oknum pejabat atau aparat yang ditugaskan memusnahkan tidak menjalankan tugasnya dengan jujur dan transparan

⁵ Pasal 128 – 130 KUHP

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya dalam skripsi ini yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan teori – teori yuridis yang ada⁶

B. Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum mengatur Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dalam Pelaksanaan Penyidikan Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Makassar?
2. Apakah Faktor – Faktor yang Menghambat Proses Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Yang menjadi fokus objek penelitian yakni barang bukti narkotika guna meninjau dan mendalami secara menyeluruh tahapan proses lanjutan terhadap barang bukti narkotika yang telah disita oleh penyidik yang selanjutnya akan mengalami pemusnahan. Adapun peninjauan penelitian bersifat kualitatif ini bermaksud mendeskripsikan gejala atau peristiwa dan kejadian yang terjadi dengan kaitannya terhadap Pasal 2 Peraturan Kepala

⁶ Rahma Dewi, "Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Makassar", *skripsi*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011

Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman sebagai pedoman dalam merealisasikan aturan tersebut dan mencoba menelusuri upaya – upaya atau tindakan – tindakan didalam penanganan yang dianggap bertentangan dengan pasal tersebut oleh stakeholder

Dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan sumber data, peneliti berusaha melakukan eksplorasi dengan sumber data, peneliti berupaya memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian dituangkan dan digambarkan sebagaimana adanya. Selain dari pada itu juga melakukan eksplorasi untuk dapat memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti yang telah dirumuskan melalui pertanyaan penelitian.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini telah dilakukan kajian pustaka oleh penyusun dan menghasilkan data beberapa mahasiswa yang sebelumnya menyusun dalam masalah yang hampir sama dengan judul yang akan penyusun buat. Oleh karena itu, untuk menghindari duplikat dari hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing – masing judul dan masalah apa yang dibahas, sejauh pengamatan penulis sampai disusunnya penelitian ini belum ada penyusun yang memfokuskan penelitian pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah Makassar tahun 2018

Melalui hasil penelusuran kepustakaan dan pencarian google yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa penelitian yang terkait namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Samsul Arisandi, tahun 2014 yang berjudul “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta tahun 2012 – 2013”. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah kajian tersebut hanya mengkaji proses pemusnahan barang sitaan narkotika dan tidak mengkaji tentang penyimpanannya.
2. Skripsi Sri Rahayu yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju” membahas pemusnahan barang bukti yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Mamuju. Adapun Skripsi ini membahas tentang pemusnahan barang sitaan narkotika yang ada di wilayah Makassar
3. Skripsi Rahma Dewi, tahun 2011 yang berjudul “Analisis Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Makassar” mengulas mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah Makassar. Adapun kaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam menulis skripsi ini adalah mengkaji tinjauan teoritis terhadap pengertian tindak pidana, barang bukti dan mengenai pasal yang mengatur penyalahgunaan narkotika.

Melihat dari pentingnya pemusnahan barang sitaan narkotika, maka perlu mengetahui prosedur pemusnahan barang sitaan narkotika agar lebih

sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Undang – undang. Teori – teori di bawah ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada.

Tri Jata Ayu Pramesti dalam tulisannya menerangkan bahwa pemusnahan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 adalah :

Serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh termasuk batang, daun, bunga, biji, akar dan bagian lain dalam hal narkoba dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi. Dalam pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Menurut Tri, barang sitaan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman (Peraturan Kepala BNN 7/2010) adalah :

Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang diduga Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang mengandung Narkoba dan Prekursor Narkoba serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang disita oleh Penyidik.⁷

Penelitian ini juga berkaitan dengan tanggung jawab yang dimiliki seorang penyidik dalam mengamankan barang bukti narkoba, sehingga penting untuk mengetahui beberapa tinjauan tentang pengertian

⁷ Tri Jata Ayu, “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51885342e665c/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkoba/> (8 Mei 2018)

penyidikan, tugas dan wewenang penyidik dan proses penyidikan terutama dalam tindak pidana narkoba. Serta diperlukannya suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan, guna untuk menjamin keutuhan dari barang sitaan tetap seperti barang bukti tersebut di sita oleh penyidik. KUHAP pasal 44 ayat (1) menyebutkan “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

Untuk selanjutnya akan dianalisis secara mendetail pada bab selanjutnya mengenai pokok pembahasan perkara barang bukti penyitaan narkoba oleh penyidik hingga proses pemusnahan barang bukti tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pemusnahan barang bukti narkoba dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang menghambat proses pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Makassar.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis:

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya mengenai proses pemusnahan barang sitaan narkoba di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan input dan informasi dalam menambah referensi bagi kalangan akademisi atau calon peneliti yang akan mengkaji isu yang sama khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap proses pemusnahan barang bukti narkoba dalam pemeriksaan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Makassar

2. Kegunaan Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penegakan hukum, khususnya dilingkungan masyarakat, sehingga terjadi transparansi dan terbukanya akses bagi publik untuk lebih mengetahui mengenai standar prosedur dalam pemusnahan barang bukti narkoba dan mengecek kebenaran barang bukti
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi pejabat pemerintah / instansi terkait, pelaku usaha, auditor, tokoh masyarakat, stakeholder, dan komponen masyarakat lainnya mengenai pemusnahan barang bukti hasil kejahatan yang disita pihak penyidik khususnya pemusnahan narkoba.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang – undangan lainnya.⁸

Defenisi tindak pidana dalam konsep KUHP, yaitu:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normati*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.⁹

⁸ I Made Widnyana, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, H. 32

1) Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba dimaksudkan sebagai penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) yang merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai / pengedar dan juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.

Bentuk penyalahgunaan tindak pidana narkotika secara khusus diatur dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum¹⁰

3. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

⁹ Pasal 4 Konsep (11) 2004 Rancangan Undang – Undang KUHP

¹⁰ “Sudut Hukum”, *Pengertian Tinjauan Yuridis*, <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, (8 Mei 2018)

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹¹

Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat bagi ilmu kesehatan untuk menghilangkan rasa nyeri dalam melakukan operasi atau kegiatan dibidang kedokteran. Namun kemudian narkotika menjadi barang yang menyeramkan dan menjadi permasalahan besar akibat adanya motivasi lain menjadikannya komoditas ilegal oleh segolongan orang tertentu.

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.¹²

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹² *Ibid* h. 2

terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Disamping itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹³

Kebijakan pemerintah lain bahwa Badan Narkoba Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, Badan Narkoba Kabupaten / Kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten / Kota berdasarkan Undang – Undang ini.¹⁴ Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang – Undang ini. Dengan berlakunya Undang – Undang ini maka Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan LN Nomor 3698) dinyatakan tidak berlaku.

4. Pengertian Alat Bukti

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat

¹³ *Ibid h. 8*

¹⁴ Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional

disimak pendapat Prof. Soebekti, S.H yang menyatakan bahwa:

Bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, bewijsmiddel (Belanda) adalah alat – alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil – dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti – bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain – lain.¹⁵

Pengertian membuktikan dalam arti yuridis menurut Prof. Dr.

Sudikno Martokusumo, S.H tiada lain berarti bahwa:

Memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian, yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.¹⁶

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya alat bukti adalah suatu barang dan atau bukan barang yang dapat digunakan untuk memperkuat tuntutan atau dakwaan atau menolak dakwaan dan tuntutan dalam proses pembuktian dalam pengadilan dari pihak penuntut dan pihak yang dituntut yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitative” alat bukti yang sah menurut undang – undang yaitu:

¹⁵ Koesparmono Irsan, Armansyah. Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm 172.

¹⁶ *Ibid.*

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Penjelasan mengenai alat bukti yang digolongkan dalam pasal 184 KUHAP diantaranya: Ayat (1) alat bukti yang sah :

- a. *Keterangan Saksi*, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri.
- b. *Keterangan Ahli*, menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang.
- c. *Alat Bukti Surat*, alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
 - 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. *Alat Bukti Petunjuk*, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. *Keterangan Terdakwa*, adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Diluar alat bukti itu, tidak dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terkait dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat – alat bukti itu saja. Dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai

kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat – alat bukti yang sah. Pembuktian diluar alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak memiliki nilai dan kekuatan hukum yang mengikat. Beberapa alat bukti dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi, keterangan para ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁷

5. Barang Bukti

Dalam upaya mencari kebenaran materil, selain menghimpun alat bukti yang sah, ada kalanya penyidik, jaksa atau penuntut umum menyita barang – barang tertentu yang terkait dengan perkara.¹⁸ Dalam perkara pidana dikenal ada istilah barang bukti, namun pengertian barang bukti jika kita lihat dalam perundang – undangan formil kita maka tidak ada pengertian serta perumusannya secara mendetail. Namun beberapa ahli mencoba mendefinisikan dan merumuskan pengertian barang bukti sebagaimana makna yang disampaikan dalam undang – undang.

Barang bukti adalah barang mengenai dengan mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau

¹⁷ Pasal 184 Ayat (1) KUHAP

¹⁸ Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 141.

hasil delik.¹⁹ Dalam hal ini, narkoba / psikotropika yang menjadi objek dalam suatu jual beli narkoba / psikotropika, merupakan bukti tentang bersalahnya terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba

Barang bukti yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh dari:

- a. *Objek Delik / Tindak Pidana Alat*, yang dipakai untuk melakukan delik / tindak pidana.²⁰
- b. *Hasil dari Delik / Tindak Pidana*, Barang – barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik / tindak pidana yang terjadi.

6. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang terjadi. Sedangkan pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke 16 KUHAP, yang berbunyi:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

¹⁹ *Ibid.* Hlm 149.

²⁰ Koesparmono Irsan, Armansyah. Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm 172.

Terhadap benda atau barang bukti yang tersangkut dalam tindak pidana, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian sidang pengadilan, maka untuk sementara penyidik dapat melakukan penyitaan.

Disamping itu telah disebutkan juga dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 87 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang – kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.²¹

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan diatas wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam tempo waktu 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tujuan dari dilakukannya penyitaan itu sendiri adalah untuk kepentingan Pembuktian, yang mana ditujukan sebagai barang bukti dimuka pengadilan. Apabila tidak adanya barang bukti yang digunakan, maka perkara tidak dapat maju ke pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara lengkap dengan barang bukti, maka penyidik melakukan penyitaan

²¹ Pasal 87 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Kitab Hukum Acara Pidana

untuk dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan.²²

Mengenai penanganan terhadap barang bukti narkoba dan prekursor diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE018/A/JA/08/2015 tentang penanganan terhadap barang bukti narkoba dan prekursor, tata cara penanganannya antara lain:²³

- a. Dalam hal Kepala Kejaksaan negeri setempat menerima surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba, maka surat pemberitahuan dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak
- b. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba karena apabila telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Setelah penetapan status benda sitaan Narkoba oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2):²⁴

Barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyimpanan barang bukti narkoba sebagian disisihkan untuk kebutuhan pembuktian pada

²² Yahya Harahap, Jakarta, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua)*, penerbit Sinar Grafika, h. 264.

²³ <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE018.pdf> diakses pada tanggal 8 Mei 2018

²⁴ Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

pemeriksaan perkara dan sebagian lagi dimusnahkan. Barang bukti narkotika yang disita penyidik dari tersangka kemudian dimasukkan dalam Laboratorium Forensik Polri. Namun dalam proses ini, masih terkadang ada oknum yang tidak mencatatkan kadar barang bukti dengan benar dan ada kemungkinan digunakan untuk kepentingan lain seperti dijual atau diperdagangkan kepada pihak lain.

a. Yang Berwenang Menyita

Melihat ketentuan diatas maka sudah jelas bahwa penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa:

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan Pasal 38 KUHAP tersebut maka yang dapat melakukan penyitaan adalah pihak penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Adapun tindakan hukum berupa penyitaan itu dapat dilakukan dengan dasar:

- 1) Laporan polisi;
- 2) Berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
- 3) Laporan hasil penyidikan
- 4) Berita acara pemeriksaan saksi, dan
- 5) Berita acara pemeriksaan tersangka²⁵

Dimana dari hal tersebut diatas, penyidik kemudian memperoleh

²⁵ Samsul Arisandi "Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta", *skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

keterangan tentang adanya benda atau barang yang perlu disita guna kepentingan proses penyidikan dalam hal pembuktian atau menguatkan pembuktian atau memperkuat bukti yang telah ada.

Mengingat sangat pentingnya arti dari alat bukti dan barang bukti dalam proses pembuktian, tidak heran apabila patut disangka seorang tersangka akan berusaha keras untuk menyingkirkan instrumen bukti yang dapat membuktikan kesalahannya. Karena penyitaan itu dilakukan dalam rangka acara pidana untuk mencari kebenaran materil dari sebuah kasus pidana, maka tidak ayal lagi apabila penyitaan harus dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang – undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)

b. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan

Dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, Undang – Undang membedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa. Bentuk yang biasa dengan tata cara biasa merupakan landasan aturan umum penyitaan.²⁶ Ada beberapa bentuk penyitaan dan cara penyitaan dibawah ini yaitu:

1. Penyitaan biasa dan Tata Caranya

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal – hal yang luar

²⁶ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 14

biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan – keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk atau prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.²⁷

Adapun tata cara pelaksanaan bentuk biasa atau yang umum ini meliputi hal – hal sebagai berikut:

- a) Harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Setempat
- b) Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal (Pasal 128 KUHAP)
- c) Memperlihatkan Benda yang Akan Disita (Pasal 129 KUHAP)
- d) Penyitaan dan Memperlihatkan Benda Sitaan Harus Disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan Dua Orang Saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)
- e) Membuat Berita Acara Penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
- f) Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan (Pasal 129 ayat (4) KUHAP)
- g) Membungkus Benda Sitaan (Pasal 130 ayat (1) & (2) KUHAP).²⁸

2. Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Tentang pengertian apa yang dimaksud dengan “dalam keadaan

²⁷ Yahya Harahap, Jakarta, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua)*, penerbit Sinar Grafika, h. 264.

²⁸ Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (7)

yang sangat perlu dan mendesak”, dijelaskan pada Pasal 34 ayat (1)

KUHAP bahwa:

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5).²⁹

Mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

- a) Tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan
- b) Hanya Terbatas atas Benda Bergerak Saja
- c) Wajib Segera Melaporkan Guna Mendapatkan Persetujuan

3. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda dan alat:

- a) Yang ternyata digunakan untuk tindak pidana;
- b) Benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c) Benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti

Dalam keadaan tertangkap tangan, sangat luas wewenang penyitaan yang diberikan kepada penyidik. Di samping wewenang untuk menyita benda dan alat yang disebut pada Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP memperluas lagi wewenang itu meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket:

²⁹ Pasal 34 Ayat (1) KUHAP

- a) Menyita paket atau surat;
- b) atau benda yang pengangkutan atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan;
- c) asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka;
- d) namun dalam penyitaan benda – benda pos dan telekomunikasi yang demikian, penyidik harus membuat “surat tanda terima” kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata – nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda – benda pos lainnya, sehingga terhadap benda – benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh pihak penyidik.³⁰

4. Penyitaan Tidak Langsung

Dalam ketentuan Pasal 42 KUHAP dijelaskan mengenai bentuk dan cara penyitaan “tidak langsung”. Benda yang akan disita tidak didatangi langsung dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri barang

³⁰ Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP

yang akan disita dengan sukarela. Artinya tangkap tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi disuruh mengantar atau menyerahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.³¹

Pasal 45 KUHAP menyatakan bahwa:³²

- a) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - I. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - II. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
 - III. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
 - IV. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - V. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Penyitaan dilakukan oleh kepolisian selaku penyidik sebagaimana prosedurnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kejaksaan melalui berkas perkara tindak pidana Narkotika.

³¹ Pasal 2 KUHAP

³² Pasal 45 KUHAP

Jaksa dapat meminta Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Nomor: B-926/ E/ EJP/ 03/ 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 28 maret 2013 perihal Penetapan Status Benda Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dimusnahkan. Dalam poin ke satu (1) dikatakan bahwa:³³

Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di dalam menerbitkan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, agar dipertimbangkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan dimusnahkan, sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjabarannya adalah barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah ditetapkan statusnya, wajib dimusnahkan oleh Penyidik setelah terlebih dahulu disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (vide Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 45 ayat (1), (3) dan (4) KUHAP).

c. Benda yang Dapat Disita

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penyitaan adalah tindakan pengambil alihan benda untuk disimpan dan ditaruh dibawah penguasaan penyidik. Baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga, penyimpanan, penyewa, dan sebagainya, maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan tersangka. Dari seluruh ketentuan Pasal mengenai penyitaan, terutama Pasal 39 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 1 butir 16 telah digariskan mengenai prinsip hukum dalam penyitaan benda. Prinsip itu menegaskan bahwa benda yang dapat disita menurut

³³ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-926/ E/ EJP/ 03/ 2013

Undang – Undang (KUHP) hanya benda – benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda yang tidak ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, maka benda tersebut tidak dapat dikatakan sebagai benda sitaan. Apabila penyitaan terhadap benda yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak ada hubungannya dengan suatu tindak pidana maka dapat dianggap sebagai penyitaan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah.³⁴

Terhadap benda apa saja penyitaan dapat dilakukan, atau terhadap jenis benda bagaimana sitaan dapat dilakukan apabila benda tersebut bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan, ditentukan hal tersebut dalam pasal 39 ayat (1) KUHP bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana,
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidikan tindak pidana,
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana,
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

d. Penyimpanan Benda Sitaan

Dari ketentuan Pasal 44 KUHP, benda sitaan disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan

³⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007) h. 275.

RUPBASAN. Rupbasan adalah satu – satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional, berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP. Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.³⁵

7. Pemusnahan

Kata ‘pemusnahan’ merupakan asal dari kata ‘musnah’ yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lenyap, binasa atau hilang.³⁶

Proses pemusnahan dapat diartikan suatu tindakan menghancurkan atau melenyapkan suatu benda hingga tidak terdapat sisa atau bekas dari benda tersebut. Dalam hukum pidana pemusnahan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dengan aturan yang diatur oleh Undang – Undang.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

³⁵ Pasal 44 Ayat (1) dan (2) KUHAP

³⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (8 Mei 2018)

memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.³⁷

Pemusnahan narkoba dilaksanakan oleh orang atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan peredaran narkoba yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang (Pejabat Kejaksaan Negeri setempat, Pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Penagawas Obat dan Makanan)³⁸ dan membuat Berita Acara Pemusnahan yang memuat antara lain ;

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun
- b. Nama pemegang izin khusus (Apoteker Pengelola Apotek / Dokter)
- c. Nama saksi (1 orang dari pemerintah dan 1 orang dari badan / instansi yang bersangkutan)
- d. Nama dan jumlah narkoba yang dimusnahkan
- e. Cara pemusnahan
- f. Tanda tangan penanggung jawab apotik / pemegang izin khusus / dokter pemilik narkoba dan saksi – saksi.³⁹

Kemudian berita acara tersebut dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat, dengan tembusan:

- a. Balai POM setempat.
- b. Penanggung jawab narkoba PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.

³⁷ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010.

³⁸ Pasal 61 Ayat (1) Undang – Undang Narkotika

³⁹ Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015

c. Arsip

Prosedur pemusnahan benda sitaan Narkotika sebagaimana menurut pasal 91 Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan:⁴⁰

- a. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan / atau dimusnahkan.
- b. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- c. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- d. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- e. Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- f. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- g. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

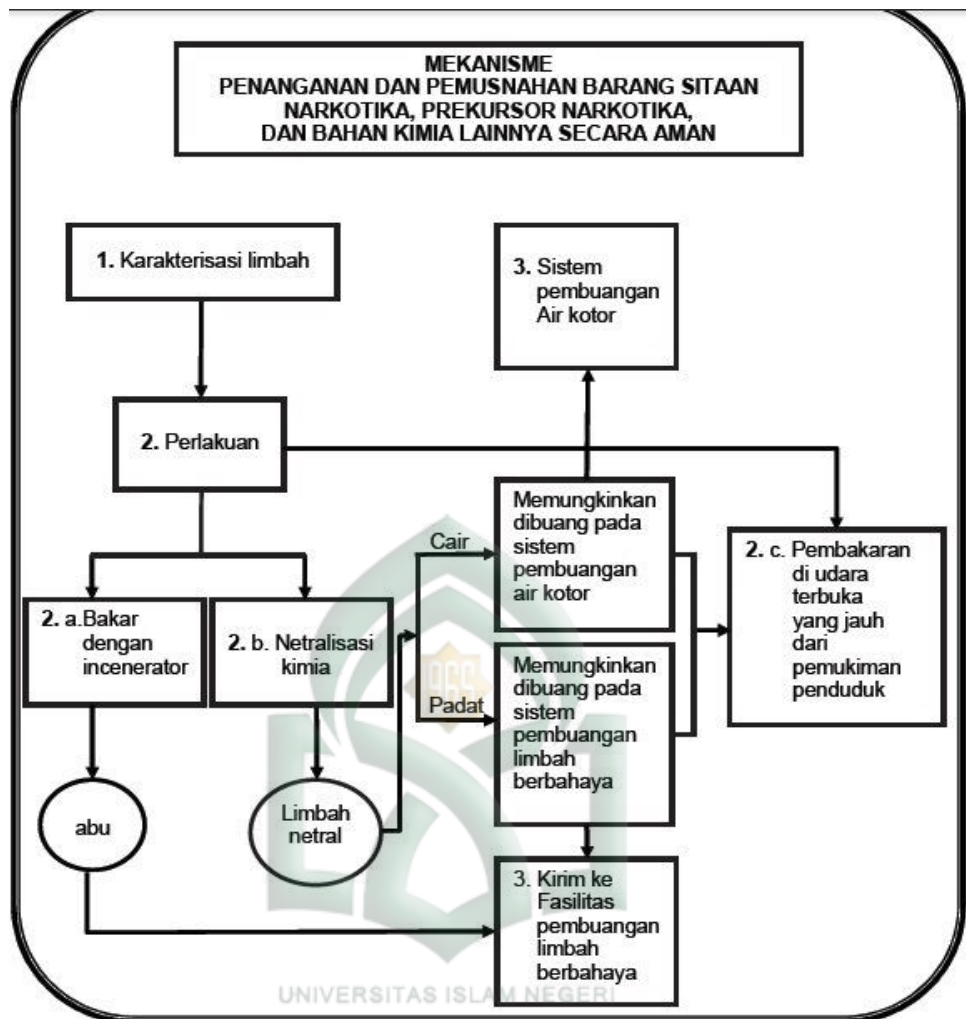
Sebagaimana uraian yang disebutkan dalam Undang – Undang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN nomor 7 Tahun 2010 yang

⁴⁰ Pasal 91 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menjelaskan tentang pedoman teknis pemusnahan benda sitaan. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai prosedur pemusnahan barang sitaan narkoba yang diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7/2010. Hanya saja, untuk ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemusnahan, diperlukan Peraturan Kepala BNN 7/2010 yang berfungsi sebagai suatu pedoman teknis dan pelaksana dari pasal – pasal dalam UU Narkotika yang memuat tentang pemusnahan barang sitaan narkoba

Peraturan Kepala BNN 7/2010 secara lengkap menjelaskan langkah – langkah pemusnahan yang tepat dan aman, yakni salah satunya dengan melakukan karakterisasi limbah untuk mengidentifikasi bahan kimia agar tidak membahayakan. Selain itu, di dalam Peraturan Kepala BNN 7/2010 tidak hanya mengatur mengenai pemusnahan barang sitaan saja, tetapi juga mengenai penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa pemusnahan secara aman yang dilakukan penyidik dengan beberapa cara seperti yang tertera dalam Lampiran Peraturan Kepala BNN 7/2010 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN 7/2010

Singkatnya, mengenai prosedur pemusnahan sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran II.1 Peraturan Kepala BNN 7/2010 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Kemudian, mengenai perlakuan terhadap barang rampasan dalam tindak pidana narkotika dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika yang berbunyi:

Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial

Di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika disebutkan bahwa perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika. Dengan demikian, masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemusnahan menurut Undang – Undang Narkotika hanya dilakukan terhadap barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika saja. Sedangkan, perlakuan terhadap barang rampasan yang berupa harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.⁴¹

Kemudian untuk Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika sendiri dilakukan setelah memperoleh penetapan status benda sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila unsur pejabat tersebut tidak dapat

⁴¹ "Hukum Online", *Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51885342e665c/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkotika>, (8 Mei 2018)

hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yang merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.

B. Metodologi Penelitian

Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem penulisan ilmiah yang proporsional. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris atau Penelitian lapangan (*Field Research*) karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung metode Hukum Normatif atau Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penggabungan metode empiris dan metode normatif ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, yang mana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu

menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum / perundang – undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Data sekunder dalam penelitian hukum ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur dan studi dokumentasi atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan.

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh dari wawancara berbentuk tanya jawab langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data. Metode ini berguna sebagai alat ukur. Untuk memperoleh data tersebut dengan memakai garis-garis pokok wawancara agar lebih terarah dan memperkuat validitas data yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan kepada informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber guna memperoleh lebih rinci tentang pemusnahan barang sitaan narkoba.
- b. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar sebagai lokasi penelitian utama, tepatnya pada kantor Kejaksaan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam melaksanakan fungsi peradilan terhadap kasus yang hendak penulis teliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. *Library Search (Penelitian Kepustakaan)*, yakni dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, antara lain buku – buku, pendapat para sarjana dan lain – lain yang diperoleh dari media cetak maupun online.
- b. *Field Research (Penelitian Lapangan)*, yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dengan menggunakan teknik observasi maupun teknik informan dalam hal ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Kejaksaan Negeri Makassar

5. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*) yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) di lapangan serta penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari sumber

literatur, jurnal, media cetak yang dilakukan dengan mempelajari konsep hukum pidana yang mengatur tentang pemusnahan barang bukti narkoba dalam literatur hukum pidana. Kemudian data yang diperoleh tersebut baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik “*kualitatif*” karena cenderung menganalisis dan mengobservasi data yang berkaitan tentang pemusnahan barang bukti narkoba kemudian disajikan secara “*deskriptif*” yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan suatu keadaan atau gejala sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan ini.⁴²

C. Hasil Penelitian

1. Profil Lembaga Kejaksaan Negeri Makassar

Kejaksaan Negeri Makassar adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Instansi ini beralamat di Jl. Amanagappa No. 15, Kel. Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar – 90111. Situs web (<https://www.kejari-makassar.kejaksaan.go.id>)

Dalam Undang – Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa:

Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang

⁴² Rahma Dewi “Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kota Makassar”, *skripsi*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang – Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2004 maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa:

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, Penyidikan tindak pidana korupsi, di bidang Perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus, Kejaksaan dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Ruang lingkup Kejaksaan Negeri Makassar terdiri dari bidang – bidang yang menjalankan tugasnya yang terdiri dari:

- a) Bidang Pembinaan
- b) Bidang Intelijen
- c) Bidang Pidana Umum
- d) Bidang Perdata & Tun
- e) Bidang Pidana Khusus

- f) Bidang Pengelolaan Barang Bukti Barang Rampasan

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Makassar

Berdasarkan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan:⁴³

- a) Bidang Pidana:

- 1) Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- 2) Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya

- b) Bidang Intelijen:

- 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- 2) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun

⁴³ Pasal 30 Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;

- 3) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- 4) Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

c) Bidang Tindak Pidana Umum:

- 1) Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab Undang – Undang hukum pidana.
- 3) Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan

lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik.

- 4) Penyiapan sarana, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
 - 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - 6) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
 - 7) Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
- d) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
 - 2) Pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;

- 3) Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
- 4) Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;
- 5) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
- 6) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- 7) Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
- 8) Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- 9) Menyiapkan bahan dan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang

diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara

e) Bidang Tindak Pidana Khusus

- 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis
- 2) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya
- 3) Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;
- 4) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada Penyelidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus yang lain serta pengadministrasiannya
- 5) Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum
- 6) Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus.

f) Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
 - 2) Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
 - 3) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
 - 4) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
 - 5) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
 - 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
- g) Sedangkan jaksa dalam ruang lingkup Kejaksaan menjalankan tugasnya sebagai:
- 1) Penuntut Umum, dan
 - 2) Eksekutor dari putusan Hakim yang telah Inkrah

Kewenangan eksekutorial jaksa yang menjalankan putusan hakim termasuk didalamnya terkait penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika. Jaksa sebagai penuntut umum memiliki kewenangan terhadap benda sitaan yang menjadi bukti dipersidangan. Jaksa memiliki otoritas terhadap benda sitaan yang disimpan di rumah penyimpanan negara. Jaksa dapat mengeluarkan benda sitaan yang disimpan di Rupbasan dengan

izin dari pengadilan guna pembuktian di persidangan. Setelah suatu putusan telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, benda sitaan narkotika tersebut harus dimusnahkan oleh jaksa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar

a) Mekanisme Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan. Rupbasan adalah satu – satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi. Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan harus disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Dalam kewenangan penyimpanan benda sitaan atau barang bukti, Kejaksaan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan barang bukti, namun terkait penyimpanan barang bukti kewenangannya dimiliki penuh oleh Kejaksaan Negeri Makassar. Kejaksaan Negeri melalui jaksa yang menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika hanya memiliki kewenangan untuk membuktikan di persidangan. Terkait barang bukti

yang disimpan, jaksa dapat mengambil dan mengeluarkan barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti guna kepentingan pembuktian di persidangan dengan surat izin mengeluarkan barang bukti dari hakim pengadilan.⁴⁴

Dalam prakteknya setelah barang bukti tersebut berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti yang keluar dari tempat penyimpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Jaksa Penuntut Umum hingga barang bukti tersebut dikembalikan di ruang penyimpanan. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan terhadap barang bukti setelah memperoleh putusan hakim di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka jaksa yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor dari putusan hakim yang melakukan ketetapan dari putusan tersebut.⁴⁵

Jika dalam aturannya penyimpanan benda sitaan atau barang bukti harus disimpan di Rupbasan, namun dalam proses penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan, praktek yang berlangsung di lapangan tidaklah demikian. Barang bukti yang seharusnya disimpan didalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang terletak di Jl. Salemba, Kel. Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 44 KUHAP tidak dijalankan secara tepat. Jika dalam aturannya segala jenis barang bukti harus disimpan di dalam Rupbasan sebagai satu – satunya tempat penyimpanan

⁴⁴ Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

⁴⁵ *Ibid.*

barang bukti, namun barang bukti yang menjadi rampasan oleh pihak yang berwenang justru tidak semuanya disimpan di dalam Rupbasan, namun penyimpanannya di Kejaksaan Negeri Makassar. Dalam prakteknya, barang bukti memang tidak disimpan di Rupbasan dan diusahakan semaksimal mungkin dapat disimpan di Kejaksaan Negeri Makassar, hal ini disebabkan karna efektifitas jika dibandingkan dengan Rupbasan, menyimpan barang bukti di Kejaksaan Negeri lebih efektif baik karena jarak Kejaksaan Negeri Makassar lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar dan memaksimalkan waktu karena setiap kali persidangan barang bukti harus dikeluarkan dan dibawa ke persidangan atas permintaan Hakim.

Penyitaan barang bukti pada awalnya dari penyidik kepolisian kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Makassar, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Makassar mengeluarkan penetapan barang bukti untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan / atau untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Makassar.

Pada awalnya penyerahan barang bukti serta tersangka dari pihak kepolisian kepada kejaksaan dengan disertakan Berita Acara Pendapat dan label barang bukti serta identitas dan register dari barang bukti dari

kepolisian yang diserahkan kepada kejaksaan. Mekanisme penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada kejaksaan mewakili unsur:⁴⁶

- 1) Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan
- 2) Kejaksaan Negeri oleh Kasi Pidana Umum
- 3) Cabang kejaksaan Negeri oleh Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Setelah penyerahan barang bukti dan tersangka dari kepolisian kepada kejaksaan, kemudian barang bukti dicocokkan dengan daftar barang bukti yang diterima yang disaksikan oleh penyidik dan terduga untuk memastikan barang bukti tersebut sesuai dengan daftar yang diterima dan kemudian disimpan dalam ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Makassar.⁴⁷

Secara aturan Rupbasan memang sebagai tempat untuk menyimpan seluruh barang bukti, namun dalam prakteknya penyimpanan barang bukti juga disimpan di Kejaksaan Negeri Makassar karena alasan lebih efisien. Barang bukti tersebut disimpan dalam suatu ruangan khusus dengan kunci yang biasa dan dikelola oleh petugas ruang barang bukti dari Kejaksaan Negeri Makassar. Barang-barang bukti yang didapat dari suatu tindak pidana diusahakan dapat disimpan di Kejaksaan Negeri Makassar. Namun apabila bentuk dari barang bukti tersebut tidak memungkinkan untuk

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

disimpan di Kejaksaan Negeri Makassar barulah kemudian barang bukti tersebut disimpan di Rupbasan seperti mobil, sepeda motor, dan barang bukti lain yang ruang penyimpanannya tidak dapat ditampung oleh Kejaksaan Negeri Makassar atau memiliki unsur yang membahayakan.

Mekanisme penyimpanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar pada umumnya sama dengan mekanisme yang diterapkan di Rupbasan, namun mekanismenya lebih mengutamakan efektifitas dalam segala proses tahapan penyimpanan benda sitaan. Dalam pengelolaan barang bukti yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Makassar, pengelolaannya menjadi tanggung jawab penuh dari petugas ruang barang bukti dimana pengamanan ruang barang bukti itu sendiri hanya dapat diakses oleh petugas ruang barang bukti dan tidak satu orangpun selain petugas ruang barang bukti dapat mengakses ruangan tersebut bahkan Kasi Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar sekalipun melainkan hanya sebagai pengawas saja.⁴⁸

Mekanisme pengeluaran benda sitaan atau barang bukti dari ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Makassar guna pembuktian persidangan harus memalalui jaksa yang menangani perkara dengan surat izin mengeluarkan barang bukti. Jaksa pada awalnya menunjukan surat izin kemudian mengisi buku register pengeluaran dan pengembalian barang bukti yang diserahkan oleh petugas ruang

⁴⁸ *Ibid.*

penyimpanan barang bukti. Setelah mengisi buku register dan kemudian barang bukti dikeluarkan dari ruang penyimpanan, status barang bukti dan pertanggung jawabannya sepenuhnya oleh jaksa yang menangani perkara hingga barang bukti tersebut dikembalikan kedalam ruang penyimpanan dan jaksa menanda tangani bukti pengembalian, kemudian tanggung jawab atas barang bukti menjadi tanggung jawab dari petugas ruang penyimpanan barang bukti.⁴⁹

Terhadap barang bukti khusus narkoba penyimpanannya sedikit berbeda, barang bukti narkoba disimpan terpisah dari barang bukti pada umumnya. Khusus terhadap barang bukti narkoba dan barang bukti berbahaya lainnya disimpan di ruang khusus yang ada di ruang penyimpanan yang disegel dalam sel khusus sehingga tingkat pengamanannya lebih tinggi. Barang Bukti Narkoba yang berada dalam ruang penyimpanan khusus akan terus berada dan disimpan di ruang penyimpanan barang bukti sampai pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan baik barang bukti tersebut dikembalikan, dilelang, dirampas untuk negara maupun untuk dimusnahkan.

b) Mekanisme Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba

Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang menyebutkan:

⁴⁹ *Ibid.*

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.⁵⁰

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba pada awalnya Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkoba dari kepolisian, dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat penetapan terhadap barang bukti narkoba tersebut dengan status dipergunakan demi kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pelatihan atau untuk dimusnahkan. Jika barang bukti narkoba dalam jumlah banyak biasanya ditetapkan untuk dimusnahkan dan jika dalam jumlah kecil dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan dimusnahkan ketika telah ditetapkan putusan terhadap barang bukti tersebut. Untuk barang bukti narkoba yang telah ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan, maka penyidik kepolisian yang melakukan pemusnahan pada tingkatan penyidikan dan kejaksaan merupakan salah satu unsur yang menyaksikan pemusnahan tersebut. Setelah dimusnahkan penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dan salinannya diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang hadir menyaksikan

⁵⁰ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010.

pemusnahan sebagaimana perintah yang termuat dalam Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan yang mengatur bahwa Kejaksaan sebagai yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan barang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari dari batas yang ditetapkan.

Namun dalam prakteknya, pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan karena ada hambatan – hambatan yang mengakibatkan pemusnahan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan. Terhadap barang bukti narkotika dan barang berbahaya lainnya, oleh Kejaksaan Negeri Makassar melalui ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar menetapkan bahwa barang bukti narkotika harus dimusnahkan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari keluarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵¹

Dari pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Makassar tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam

⁵¹ Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

ketentuannya pemusnahan terhadap barang bukti yang telah memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap harus dimusnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keluarnya putusan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian yang cukup serius terhadap aparaturnya Kejaksaan Negeri itu sendiri, mengingat barang bukti narkoba dan barang berbahaya lainnya yang jika beredar kembali dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat

Akan tetapi, dengan begitu banyaknya kendala yang menghambat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba setelah putusan hakim, Kejaksaan Negeri Makassar justru melaksanakan pemusnahan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan meskipun dianggap barang bukti narkoba yang telah mendapat putusan dari hakim pengadilan tidak aman jika disimpan terlalu lama. Karena pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran dimana barang bukti yang telah mendapat putusan pengadilan yang belum dimusnahkan dan masih disimpan di ruang penyimpanan digunakan oleh petugas Kejaksaan untuk dijual dan diedarkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari kasus yang sama terjadi di Kejaksaan Negeri Makassar, maka kepala Kejaksaan Negeri Makassar mengeluarkan edaran bahwa pemusnahan terhadap barang bukti khusus narkoba harus segera dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan dari keluarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian pada kenyataannya peraturan itu menurut penulis dinilai masih tidak berjalan dengan efektif.

Dari pengalaman yang pernah terjadi terkait penyelewengan kekuasaan terhadap barang bukti narkoba, sanksi yang diberikan kepada petugas yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas berupa pemecatan secara tidak hormat yang artinya dicabut jabatan dan dikeluarkan dari lembaga kejaksaan bahkan dipidanakan. Hal ini merupakan suatu ketegasan yang diberikan agar pelanggaran – pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.⁵²

Meski dalam prakteknya pejabat kejaksaan tidak menjalankan mekanisme penyimpanan dan pemusnahan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang – undangan, pejabat kejaksaan juga mendapati sanksi dari pengawas ketika dilakukan tindakan pengawasan yang biasanya pada akhir tahun oleh Lembaga pengawas kejaksaan. Jika didapati adanya ketidak sesuaian maka pejabat kejaksaan juga diberikan sanksi berupa sanksi administrasi ringan seperti teguran lisan ataupun tulisan dan sanksi administrasi ringan seperti ganti rugi dan skorsing sementara.

4. Kendala – kendala dan Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar dalam Mengatasi Pemasalahan Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang – Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan

⁵² Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, kejaksaan melalui jaksa memiliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkoba.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini melalui Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Negeri Makassar, selama Tahun 2018 Kejaksaan Negeri Makassar sudah menangani 313 kasus narkoba hingga awal Desember 2018. Barang bukti yang disita beragam dan sudah dimusnahkan seluruhnya baik pemusnahan di tingkat penyidikan maupun setelah memperoleh putusan pengadilan. Meski pemusnahannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan Undang – Undang yang dilakukan sekaligus pada akhir November 2018 yang lalu.

Berikut data yang diperoleh dalam pemusnahan barang bukti Narkoba di Kejaksaan Negeri Makassar 2017 – 2018:

DATA PEMUSNAHAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2017					
Hari/Tg/Bln /Thn	Nama	Jenis	Sifat	Jumlah	Tempat Pemusnahan
Selasa/28/08/2018	Ganja	Tanaman		167,945 gr	Kejari
	Sabu	Bahan Kimia		349,573 gr	Kejari
	Pil Ekstacy	Bahan Kimia		517,518 gr	Kejari

DATA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2018					
Hari/Tgl/Bln/Thn	Nama	Jenis	Sifat	Jumlah	Tempat Pemusnahan
Kamis/29/06/2017	Ganja	Tanaman		1.395 gr	Kejari
	Sabu	Bahan Kimia		841,091 gr	Kejari
	Pil Ekstacy	Bahan Kimia		648,587 gr	Kejari

Sedangkan kasus Narkotika di Kejaksaan Negeri pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan data yang di himpun di Kejaksaan Negeri, yaitu:

Tahun 2017		Tahun 2018	
Nama	Jumlah	Nama	Jumlah
Sabu	117 kasus	Sabu	156 kasus
Ganja	124 kasus	Ganja	148 kasus
Ekstacy	6 kasus	Ekstacy	9

Sementara untuk obat daftar G terdapat jenis Somadril 25.747 butir, THD 87.260 butir, Tramadol 397.350 butir, PCC 1.120 butir, Carnaphen 1.870 butir dan Dextro 6500 butir dengan total 519.847 butir. Tak hanya itu, barang bukti senjata tajam berbagai jenis turut dimusnahkan seperti badik 13 buah, anak panah 61 buah, ketapel 19 buah dan parang 15 buah dengan total keseluruhan 108 buah.

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Makassar, Tabrani mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil kejahatan yang status hukumnya telah incrat. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Pembakaran berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Selasa (28/8) dipimpin Kepala Seksi Pidana Umum (Kasapidum) Kejari Makassar, Andi Muldani didampingi perwakilan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar. Tabrani membeberkan, bahwa kasus yang menonjol yang ditangani kejaksaan adalah narkoba. Menurutnya kasus narkoba di Kota Makassar sangat memprihatinkan, pasalnya dari data selama 2017 lalu, para pelaku 20 persen dinominasi adalah anak dibawah umur. Tabrani menambahkan, kasus yang menonjol juga kejahatan begal dan jambret. Sehingga lanjut Tabrani, kasus kejahatan di jalan disinyalir memiliki keterkaitan dengan kasus narkoba.⁵³

Disamping dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Kejaksaan selalu mengalami hambatan dan kendala – kendala sehingga pelaksanaan tugasnya bisa berbeda sebagaimana diamanatkan Undang – Undang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang mempengaruhi faktor penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba.

⁵³ Tabrani, (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

Dari hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Makassar, faktor – faktor penghambat yang menjadi kendala kejaksaan dalam hal penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba diantaranya :

a) Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis.

Tempat segala jenis benda sitaan berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHAP harus disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Namun dalam prakteknya, dikarenakan lokasi Rupbasan terletak jauh dari lokasi Pengadilan, maka benda sitaan Narkoba dan lainnya disimpan di Kejaksaan Negeri Makassar. Penyimpanan benda sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Makassar ini dianggap lebih efektif dikarenakan pada saat persidangan di Pengadilan, Jaksa Penuntut harus mengeluarkan barang bukti dari ruang penyimpanan barang bukti dan dihadirkan di persidangan.

Ketika hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti di persidangan dan hal tersebut dapat berulang kali, maka Jaksa Penuntut Umum akan kewalahan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengambil barang bukti dan mengembalikannya. Selain jarak yang cukup jauh, tanggung jawab yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum akan lebih besar jika semakin lama barang bukti tersebut berada diluar tempat penyimpanannya. Oleh karena

itu penyimpanan benda sitaan narkoba atau barang bukti narkoba disimpan di Kejaksaan Negeri dengan alasan efektifitas.⁵⁴

Jadi dalam hal ini penyimpanan benda sitaan narkoba yang disimpan di Kejaksaan Negeri Makassar tidaklah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Semestinya benda sitaan narkoba disimpan di dalam Rupbasan dikarenakan di wilayah Makassar terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Lain halnya apabila Rupbasan tidak ada, benda sitaan dapat disimpan di Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polda, Gedung Bank Indonesia ataupun tempat lain jika dalam keadaan memaksa sebagaimana ketentuan yang berlaku.

b) Tempat Penyimpanan Benda Sitaan yang kurang memadai.

Ruang penyimpanan benda sitaan atau barang bukti yang ada masih sangat jauh kurang memadai dari yang seharusnya, masih sangat banyak barang bukti yang tidak dapat ditampung di Kejaksaan Negeri Makassar, bahkan Rupbasan misalnya dalam kasus lain selain narkoba, banyak barang bukti seperti kapal laut yang seharusnya ditempatkan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara namun tidak bisa ditempatkan, sehingga kejaksaan harus mengambil langkah sendiri bekerjasama dengan instansi luar untuk mengatasi hal tersebut. Hal seperti ini sering menyulitkan kejaksaan dalam perkara penanganan barang bukti.⁵⁵

⁵⁴ Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

⁵⁵ Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

Selain di Rupbasan, ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Makassar juga masih kurang memadai, ruangan yang sempit untuk menyimpan barang bukti yang begitu banyak menjadi salah satu faktor penghambatnya sehingga untuk penyimpanan barang bukti sering disiasati agar dapat muat dalam ruang tersebut. Namun meski dengan keterbatasan itu pihak Kejaksaan masih berupaya semaksimal mungkin agar keamanan dan kondisi barang yang berada di ruang penyimpanan terjaga dengan baik.

Ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Makassar berupa sebuah ruang pada umumnya dengan lemari kayu (rak) yang tidak berpintu dengan kunci pengaman yang biasa saja. Sehingga jika dibandingkan dengan ketentuan yang seharusnya bahwa ruang penyimpanan benda sitaan tersebut mesti dengan keamanan yang tinggi, tidak mudah terbakar, terdapat ruang penyimpanan khusus seperti brankas untuk menyimpan benda berharga dan berbahaya, dan ruang penyimpanan khusus untuk menyimpan barang bukti narkoba dan zat berbahaya lainnya, maka ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Makassar masih jauh dari ketentuan – ketentuan tersebut.

Dari kondisi lapangan yang diperlihatkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar, dapat dilihat banyak barang bukti yang seharusnya disimpan pada tempat yang harus dipisah – pisahkan, namun prakteknya barang bukti tersebut disimpan berdampingan dan berdesakan karena kondisi ruang yang sempit sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut

dapat rusak dan tidak terjamin keutuhannya. Demikian pula dengan barang bukti narkoba yang seharusnya disimpan di ruangan khusus dengan keamanan yang lebih ketat agar kondisi fisik dari barang bukti tersebut tidak rusak, namun dalam ruang penyimpanan Kejaksaan Negeri Makassar benda sitaan narkoba tersebut masih disatukan dengan barang bukti yang lain dan dipisahkan hanya dengan dimasukkan kedalam kotak plastik dengan label “barang bukti narkoba”. Meskipun barang bukti narkoba tersebut sedikit berbeda karna ditempatkan dalam sel di ruang penyimpanan, namun barang bukti narkoba tersebut masih disatukan dengan barang bukti lain sehingga tidak menjamin keamanan dan keadaan fisik dari barang bukti narkoba tersebut.

c) Kendala Biaya

Biaya merupakan faktor paling berpengaruh agar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab kejaksaan dapat dijalankan dengan baik. Ketika aturannya mengatakan bahwa tempat penyimpanannya harus aman, luas dan fasilitasnya harus memadai, namun biaya yang dianggarkan untuk itu tidak sepadan dengan apa yang diatur hal ini selalu menyulitkan petugas kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga dengan pemusnahan, pemerintah menganggarkan biaya pemusnahan hanya 2 sampai dengan 3 kali dalam setahun, namun dalam perkara narkoba dituntut agar pemusnahan barang bukti narkoba dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan biaya yang sangat sedikit kejaksaan

dipaksa melaksanakan dan menyelesaikan masalah tanpa harus ada masalah.

Dalam melaksanakan pemusnahan, bahkan sering kali pihak kejaksaaan harus melakukannya secara sukarela dan bahkan mengeluarkan biaya pribadi. Namun agar tidak timbulnya masalah dikemudian hari kejaksaaan harus melakukan itu. Inilah yang sudah menjadi rahasia nasional dimana kebiasaan tuntutan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai aturan namun persoalan biaya selalu menjadi faktor utama sebagai penghambat.⁵⁶

d) Prosedur Pemusnahan yang merepotkan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Prosedur pemusnahan dengan serangkaian seremonial yang harus dilakukan bukan hanya tinggal memusnahkan. Hal ini menjadi kendala dalam melaksanakan suatu pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang sangat sedikit.

e) Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat.

Dalam aturan sebagaimana termuat dalam pasal 92 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 mengenai pemusnahan harus dilaksanakan 7

⁵⁶ Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

hari setelah menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Makassar, dalam prakteknya masih sangat sedikit sekali pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Hal tersebut disebabkan banyaknya perkara narkoba yang ditangani kejaksaan sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkoba dalam waktu yang berdekatan. Sehingga jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari barang bukti narkoba harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari kejaksaan harus memusnahkan barang bukti narkoba yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Jumlah dari barang bukti narkoba yang sedikit yang jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dan dilakukan juga merupakan suatu kendala karena dapat menghabiskan terlalu banyak biaya. Sehingga barang bukti narkoba yang sedikit itu disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan dan dimusnahkan sekaligus.

Dari semua kendala – kendala yang dihadapi dalam ruang lingkup penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba. Kejaksaan Negeri Makassar sudah melakukan upaya – upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya – upaya yang dilakukan diantaranya:

- I. Kejaksaan Tinggi Sulsel berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Makassar dalam mengatasi kendala penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan.
- II. Mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.
- III. Melakukan pengawasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Makassar maupun yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
- IV. Melakukan Evaluasi kendala – kendala yang dihadapi di lapangan.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau secara yuridis keseluruhan dari hasil pembahasan tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan Negeri Makassar, maka penulis mendapati fakta – fakta yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan pedoman pemusnahan barang bukti narkoba yang ada dalam peraturan perundang – undangan. Berikut ini kesimpulan dari penulis:

1. Mekanisme tata cara penyimpanan Benda Sitaan Narkoba dilakukan dengan menyerahkan benda sitaan atau barang bukti dari pihak kepolisian kepada kejaksaan yang kemudian disimpan di Kejaksaan Negeri Makassar dalam Ruang Penyimpanan Benda Sitaan dibawah pengawasan Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Sitaan Petugas didampingi Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar tidaklah sesuai dengan aturan Perundang – Undangan. Seharusnya segala jenis barang sitaan disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP.
2. Mekanisme Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba yang dilakukan Kejaksaan Negeri Makassar melalui proses pengumpulan Barang

Bukti Narkotika dalam jumlah banyak terlebih dahulu baru kemudian dimusnahkan sekaligus dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Hal tersebut berbeda ketentuannya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa jangka waktu Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus segera dimusnahkan paling lama 7 (tujuh) hari.

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan Kejaksaan Tinggi Sulsel berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Makassar dalam mengatasi kendala penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan agar menjalankan mekanisme penyimpanan benda sitaan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku
2. Mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan agar pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dapat dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Makassar maupun yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
4. Melakukan evaluasi kendala – kendala yang dihadapi di lapangan.
5. Kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Himpunan Peraturan Perundangan. *Anti Narkoba*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Koesparmono, Irsan Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Widnyana, I Made. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Sidharta, Arief. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Prasetyo, Ridwan Eko. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalm Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Effendy, Rusli. *Manusia dan Kejahatan*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1989.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

B. Undang – Undang

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional Indonesia.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Barang Berbahaya Lainnya.

Surat Edara Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti narkotika dan Prekursor Narkotika.

PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015.

C. Karya Ilmiah

Arisandi, Samsul. “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta”. *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Dewi, Rahma. “Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

oleh Anak di Kota Makassar”. *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011.

Rahayu, Sri. “Tinjauan Yuridis Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju”. *Skripsi* Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2012.

Rizal, Safrul. “Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus pada Kejaksaan Tinggi Aceh)”. *Skripsi*, Aceh: Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Ngeri Alauddin Ar – Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

D. Sumber Online

Tri Jata Ayu. “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika”. *Situs Resmi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51885342e665c/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkotika/> (8 Mei 2018).

Sudut Hukum, “Pengertian Tinjauan Yuridis”. *Situs Resmi Sudut Hukum* <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, (8 Mei 2018).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (8 Mei 2018)

<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhum/SE018.pdf>

<http://kejari-makassar.kejaksaan.go.id/>

E. Wawancara

Tabrani, Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar. Wawancara oleh Ahmad Taufik. *Skripsi*, 4 September – 18 Oktober 2018

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Nomor : B- ¹⁴ /R.4.10/Cp.1/10/2018.
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan telah melakukan
 Penelitian atas nama AHMAD
 TAUFIK.

Makassar, 18 Oktober 2018

KEPADA YTH :
 DEKAN FAKULTAS HUKUM
 SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN
 DI -

MAKASSAR

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : AHMAD TAUFIK
 Nim : 10500113178
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan penelitian sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018 dengan judul Skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Makassar".

Demikian untuk maklum.

ALAUDDIN
 M A K A S S A R
 An.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN
 BARANG HIMPASAN



TABRANI, SH.
 JAKSA MUDA NIP. 19791005 200212 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar (sebagai laporan);
2. A r s i p.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 5855/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2517/SH.01/PP.00.9/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **AHMAD TAUFIK**
Nomor Pokok : 10500113178
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 September s/d 04 Oktober 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 04 September 2018

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 04-09-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbbkpmmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_prov.sulsel@yahoo.com
Makassar 90222

